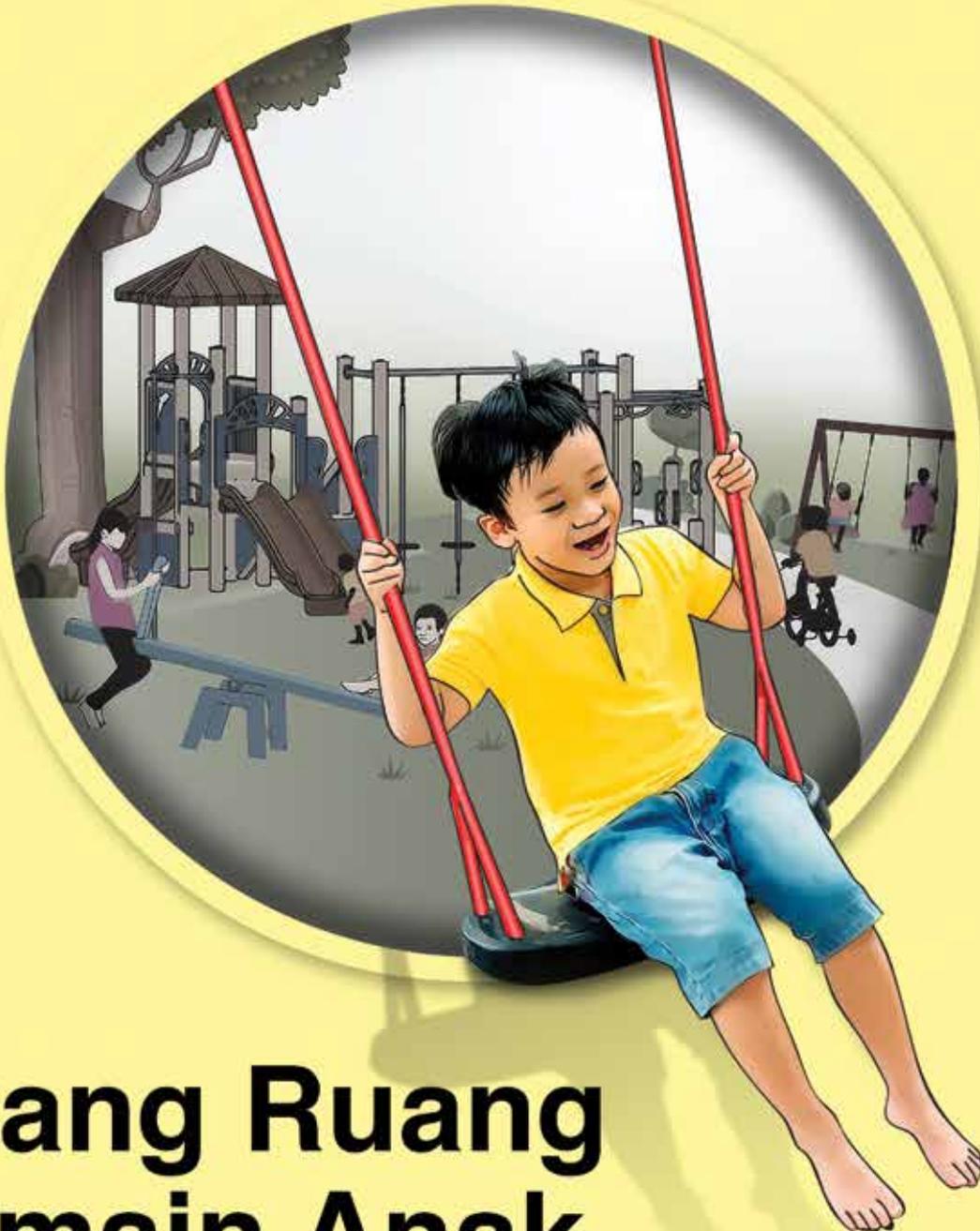




Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



Kurang Ruang Bermain Anak

Semangat Kemerdekaan



Bagi manusia, hari kelahiran merupakan hari spesial sebagai penanda dimulainya kehidupan di luar rahim. Sementara perayaan hari kemerdekaan bagi sebuah bangsa, dinobatkan untuk penanda terbebasnya belenggu penjajahan.

Tahun ini, kita merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke 77. Motto peringatan hari kemerdekaan tahun ini, merefleksikan perjuangan kita sebagai bangsa saat ini hingga sekarang agar tetap optimistis menggapai cita-cita di masa depan selepas pandemi.

Perayaan HUT kemerdekaan dalam setiap tahunnya, tentu bukan untuk simbolis seremonial semata. Melainkan sarana pengingat dan upaya menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa yang telah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia.

Semangat kemerdekaan tak boleh padam dan senantiasa mengalir di kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seperti kami yang terus semangat menyuguhkan informasi wakil rakyat Kabupaten Cirebon kepada segenap pembaca budiman majalah Cirebon Katon. Kami berkeinginan memberikan bacaan segar setiap bulannya.

Pada edisi kali ini, kami menyajikan tema fokus mengenai ruang bermain ramah anak (RBRA) di Kabupaten Cirebon. Kami berharap dengan liputan ini, para pembaca semakin tahu betapa pentingnya ruang bermain bagi anak-anak untuk menunjang pertumbuhan mereka.

Meski begitu, tak luput kami sangat menunggu kritik, saran dan ide dari para pembaca untuk kemajuan majalah ini. Selamat HUT RI ke 77. Sekali merdeka tetap merdeka. Salam Cirebon Katon!

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Hj Eriati
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

H. Sofwan, S.T
(Ketua Komisi 1)

Pandi, S.E
(Ketua Komisi 2)

Anton Maulana, S.T, M.M
(Ketua Komisi 3)

Aan Setiawan, S.Si
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Handi Eko Prasetyo, S.Kom, MM
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Dra. Puti Amanah Sari
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

Redaktur :

Yusuf

Reporter :

Supardi • Kustano • Muiz • Amir

Fotografer :

Qushoy

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman

Distribusi :

Firman • Misbah

Korespondensi:

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Minim Ruang Terbuka
Anak Pun Bermain di Area Berbahaya

10 | Baru Andalkan Sosialisasi Perlindungan Ramah Anak



16 | KILAS

Gempita Perayaan HUT Kemerdekaan



18 | PUBLIKA

Petani Garam Keluhkan Lahan Terendam Banjir



22 | LENSА

Ajarkan Makna Kemerdekaan Sejak Dini



24 | PROFIL

Asep Sutandi SE M Si
Maniak Gowes

28 | DINAMIKA

Pastikan Hotel Tertib dan Ikuti Aturan

30 | Sambut Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi

32 | Komisi I Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sindang Kempeng

34 | Komisi IV Minta Puskesmas Fokus Lakukan Verwal Data



36 | POTENSI

Mangrove Kasih Sayang

Sempat Tutup, Kini Segera Buka dengan Nuansa Baru



38 | DESA

Panguragan Lor
Kebut Bangun Jalan Desa

Minim Ruang Terbuka Anak Pun Bermain di Area Berbahaya

Sejauh ini hanya ada 8 ruang ramah bermain anak di Kabupaten Cirebon. Pemdes mengaku, tak punya anggaran untuk dapat mendirikan RBRA. Apa dampak tak punya RBRA?



Setiap sore di Desa Gembongan, Kecamatan Babakan, puluhan anak-anak akan memadati area rel kereta api yang berlokasi dekat dari pemukiman. Mereka tampak ceria bermain, bercanda di sekitar rel. Ada yang tengah berjalan di baja rel, mengambil batu maupun berlarian. Saat bunyi kereta terdengar mendekat, mereka akan berlari menghindar sebentar.

Meski bermain merupakan hal biasa, apa yang dilakukan puluhan anak desa Gembongan tentu tak dapat dibenarkan. Ancaman dan bahaya kecelakaan sewaktu-waktu dapat saja terjadi. Namun tak ada lagi pilihan. Mereka terpaksa bermain di rel kereta

karena tak adanya ruang bermain yang tersedia di desa.

“Memang terpaksa anak-anak itu bermain di rel kereta. Kalau saja desa memfasilitasi taman bermain anak tentu anak-anak juga bakal beralih main,” ujar Sut (43), Warga Desa Gembongan.

Sut mengatakan, anak-anak memilih bermain di sekitar rel tentu bukan tanpa alasan. Selain karena minimnya edukasi juga disebabkan minimnya ruang bermain ramah yang tersedia. Keadaan itu yang membuat anak-anak tak sepenuhnya disalahkan.

Dampak minimnya tempat bermain anak di Desa Gembongan, tak hanya menyebabkan anak



memilih bermain di tempat berbahaya. Sebagian lainnya, memilih menjadi pecandu gawai tanpa kontrol. Ibu Sut, sapaannya, menceritakan, hampir setiap hari ia melihat anak-anak usia SD berkumpul di rumah salah seorang warga berjam-jam.

“Bahkan setiap malam minggu, anak-anak kecil main hape (*handphone*) sampai menginap di rumah itu. Biasanya mereka bermain game dan sosial media di rumah yang menyediakan wifi itu,” katanya.

Kondisi tersebut tentu membuat Ibu Sut merasa prihatin. Di usianya yang masih anak-anak, bukannya mereka beradaptasi mengenal lingkungan sekitar, justru disibukkan bermain game yang tak produktif bagi perkembangan kepribadian.

Ibu Sut berharap, tempat ber-

main ramah anak di Desa Gembongan bisa disediakan. Sehingga tak ada lagi anak-anak yang kecanduan game tanpa mengenal waktu maupun bermain di rel kereta yang membahayakan keselamatan.

Kuwu Desa Gembongan Sobirin pun menyadari, bila banyak anak-anak yang bermain di rel kereta api setiap hari. Bahkan saban minggu pagi, jumlahnya lebih banyak.

“Karena sambil Jogging di rel kereta jadi ramai ditambah banyak pedagang juga yang berjualan,” katanya.

Sobirin sebenarnya telah mengimbau warga untuk tidak bermain di rel. Namun imbauannya tak digubris. Karena itu, kata dia, Pemdes Gembongan berinisiatif menyiapkan petugas untuk menjaga keamanan di lokasi rel.

“Alhamdulillah keadaan kondusif. Sebab sejauh ini belum terjadi dan belum ada laporan kecelakaan. Apa lagi di rel kereta dilengkapi 4 petugas yang menjaga secara bergantian. Semoga keadaan tetap aman,” jelasnya.

Sobirin mengatakan, Desa Gembongan belum membutuhkan tempat bermain yang ramah anak karena sejauh ini sudah memiliki lapangan basket dan sepakbola.

Meski Pemdes Gembongan mempunyai banyak lahan kosong, Sobirin menjelaskan belum berencana membangun Ruang Bermain Ramah Anak (RABRA).

“Sebab keberadaan dua lapangan itu dirasa cukup untuk memfasilitasi anak-anak bermain. Kalau permainan anak seperti ayunan, jungkat-jungkit, prosotan itu memang di desa belum ada. Lagi pula, anak-anak lebih suka bermain olahraga,” jelasnya.

Kepala Seksi Pemenuhan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Cirebon Sri Lina Andriana menjelaskan, sejauh ini Kabupaten Cirebon baru memiliki 8 tempat bermain ramah anak. Namun itu pun belum berstandar layak RBRA karena belum dinilai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Lina menyadari, minimnya tempat bermain ramah anak di Kabupaten Cirebon menjadi penanda masih minimnya perlindungan anak di Kabupaten Cirebon. Imbasnya, banyak terjadi kasus yang dialami anak Kabupaten Cirebon seperti kekerasan seksual maupun *bullying*.

Meski demikian, sejumlah upaya telah ia lakukan agar tempat bermain ramah anak di Kabupaten Cirebon bisa bertambah.



Pertama, ia telah berkoordinasi dengan UPTD Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar bisa mendorong setiap kecamatan memiliki RBRA. Namun upaya itu hingga kini belum terwujud.

Kedua, ia telah mendorong pemdes untuk membangun tempat bermain ramah anak. Namun upaya itu juga belum berhasil. Alasannya pemdes masih memprioritaskan dana desanya untuk program penanganan pandemi covid-19.

“Beberapa desa di Palimanan, Susukan Lebak dan Waled telah kami dorong agar menyediakan tempat bermain ramah anak. Tetapi pemdes belum memprioritaskan karena untuk kebutuhan lain,” ungkapnya.

Upaya pengadaan taman bermain ramah anak oleh pem-

des-pemdes sebenarnya telah diupayakan Pemkab Cirebon melalui Surat Edaran (SE) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) dan Optimalisasi Dana Desa Tahun 2020. Sayangnya dalam SE tersebut anggaran yang harus disiapkan pemdes hanya senilai Rp 9,2 juta.

Bahkan upaya tersebut hingga kini belum berjalan. Hal itu dikarenakan munculnya Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang hanya memprioritaskan program pemulihan pasca pandemi.

“Kedepan kita lihat dulu bagaimana keputusan dari Bupati. Apakah kembali menerapkan surat edaran itu atau tidak”, ujar Kabid Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon Aditya

Arif Maulana.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Hanifah merasa prihatin dengan minimnya RBRA di Kabupaten Cirebon. Padahal, kata dia, keberadaan RBRA dapat membangun perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik anak.

Hanifah menjelaskan, masa *golden age* atau periode emas anak merupakan masa awal kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan anak yang begitu pesat. Sehingga pemerintah berkewajiban melindungi anak. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak saling lempar tanggung jawab dalam upaya mendirikan RBRA.

“Dinas-dinas harus bisa membangun banyak RBRA di Kabupaten Cirebon sesuai tupoksinya. Apalagi itu kan sudah amanah Kementerian PPPA,” pungkasnya. •Iz

Ketua KPAID: Jangan Hilangkan Hak Anak Bermain

Terbatasnya ruang bermain ramah anak yang tersedia, dinilai telah menghilangkan hak anak mendapatkan kebutuhan bermain.



Pada masa anak-anak, pertumbuhan yang sehat tak hanya ditandai pada perubahan fisik namun juga disertai dengan perkembangan mental.

Baik kesehatan fisik dan mental diperlukan anak untuk menjalani kehidupan remaja hingga dewasa.

Salah satu faktor untuk menjaga kesehatan mental yakni tercukupinya anak bermain. Sehingga keberadaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) menjadi elemen penting.

“Banyak kasus dimana anak-anak bermain di tempat yang berbahaya dan tidak semestinya karena tidak adanya RBRA yang memadai,” ujar Ketua Komisioner Perlindungan Anak Komisi Perlindu-

ngan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon, Fifi Sofiyah.

Menurutnya, kurangnya perhatian orangtua dan minimnya tempat bermain untuk anak menjadi penyebab sehingga anak kehilangan haknya untuk bermain.

“Selain perhatian orangtua, ruang bermain untuk anak juga sangat penting, supaya anak bisa mendapatkan haknya untuk bermain di tempat yang nyaman dan aman,” katanya.

Fifi menegaskan, Kabupaten Cirebon perlu memiliki tempat bermain agar anak tidak kecanduan gawai maupun memilih bermain di tempat



Foto: dok. fifi

Fifi Sofiah (Ketua Komisisionir KPAID Kab. Cirebon)

yang bisa membahayakan keselamatannya. Ia pun berharap, setiap desa wajib memiliki ruang bermain anak yang nyaman dan menyenangkan.

“Ruang bermain anak di setiap desa harus ada, dengan berdasarkan lokasi yang strategis dengan tambahan fasilitas lingkungan, alat bermain dan lain sebagainya,” tegasnya.

Fifi juga menambahkan, ruang bermain anak harus memiliki fasilitas yang bisa membantu melatih motorik anak. Selain itu, pemerintah harus memastikan seluruh fasilitas di tempat tersebut aman untuk digunakan anak.

“RBRA juga harus nyaman dan aman, mempunyai sirkulasi udara yang baik, memiliki fasilitas yang bisa melatih motorik anak, permainan-permainan yang tidak harus memakai gawai,” tambahnya.

Adanya RBRA, tutur Fifi, menjadi tempat paling tepat bagi

anak menghabiskan waktunya. Karena itulah sebuah RBRA harus bisa mengedukasi anak saat bermain. Sehingga anak bermain namun tetap mendapat pengetahuan baru.

“Ruang anak harus mempunyai tujuan, diantaranya supaya anak bisa berekspresi dan mengeksplor idenya. Otomatis motoriknya harus berjalan dan juga harus ada yang mengawasi. Selanjutnya ada edukasi yang harus diterapkan di ruang bermain anak,” tuturnya.

Menurut Fifi, perkembangan anak bukan hanya tanggung jawab masing-masing orangtua, namun pemerintah juga memiliki kewajiban memfasilitasi anak mendapatkan haknya yakni tersedianya ruang bermain.

Sehingga, langkah lebih baik jika pemerintah mampu menyediakan tempat bermain anak hingga tingkat hilir. Tempat bermain anak tidak harus mewah,

taman baca saja itu sudah termasuk tempat bermain anak.

“Area bermain anak sampai tingkatan dasar seperti desa, RT atau RW. Tempat bermain anak tidak harus mewah, ada taman baca saja itu sudah cukup, dan kalau sebatas itu saya rasa swadaya masyarakat juga bisa digunakan,” kata Fifi.

Kepala Seksi (Kasi) Pemenuhan Hak Anak (PHA) Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Cirebon Sri Lina Andriana, mengakui, banyak kasus kekerasan yang menimpa anak di Kabupaten Cirebon karena faktor tak adanya ruang ramah bagi anak.

“Kami menyadari banyak kasus soal anak, seperti kekerasan pada anak dan praktik *bullying*. Kita sudah masuk ke PAUD dan TK untuk menuju sekolah ramah anak,” ungkap nya.

Sebelum pandemi, DP3AKB sering bersosialisasi ke desa untuk membuat lokasi ramah bermain anak, namun semenjak pandemi kegiatan itu tidak berjalan lagi karena *refocusing* anggaran.

“Dulu sebelum pandemi sering banget kita sosialisasi ramah anak yang difasilitasi desa-desa. Tapi sejak pandemi kegiatan itu tidak berjalan lagi. Semoga di tahun ini bisa kita lakukan kembali,” ujar Fifi.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Hj Hanifah, menjelaskan adanya RBRA akan dapat membantu meminimalisasi tingkat kecanduan anak pada gawai dan bermain secara tidak sehat.

“Ya karena selain kurang perhatian orang tua, anak keseringan main gawai karena tidak adanya ruang bermain yang layak untuk anak. Akhirnya mereka beralih ke hal lain,” jelas Hanifah.



Sri Lina Andriana (Kasi Pemenuhan Hak Anak DP3AKB)

Meski demikian, selain berkewajiban menyediakan tempat bermain, pemerintah harus memastikan fasilitas yang tersedia aman digunakan oleh anak dan bisa melatih perkembangan pribadi anak yang baik.

“Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi tempat bermain yang aman dan nyaman bagi anak, tempat bermain itu bisa untuk membangun perkembangan anak baik kognitif, afektif dan psikomotorik,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, harus mulai tanggap dalam masalah pemberdayaan anak, dimulai dari menyediakan tempat bermain yang layak untuk anak, mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak. Sehingga hal itu akan meminimalisasi tindak kekerasan pada anak.

Oleh karenanya, Hanifah menegaskan, DP3AKB harus tetap memiliki semangat untuk mewujudkan ketersediaan RBRA.

“Jika DP3AKB merasa enggak punya kekuatan untuk mendorong program tersebut karena tidak ada dana, minimal semangat untuk mewujudkan RBRA itu harus ada, baik melalui usulan kegiatan dan pembangunan infrastruktur maupun mendorong lahirnya perda dan perbup,” jelas Hanifah.

Politisi Fraksi PKB itu berharap, Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak saling lempar tanggung jawab mengenai RBRA. Untuk mendorong ruang ramah sejak di desa, Pemkab Cirebon harus bekerjasama dan saling berkoordinasi.

Dia menuturkan, anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dididik dengan baik, dibina dengan proses yang menyenangkan. Sehingga mewujudkan RBRA adalah keharusan agar citra Kabupaten Cirebon ramah anak benar dilakukan.

“Harapan saya, para pemangku kebijakan jangan pada *tendongan* (saling menyalahkan) dan merasa tidak bertanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab kita semua, mari saling berkoordinasi untuk mewujudkannya,” jelas Hanifah. •Par



Baru Andalkan Sosialisasi Perlindungan Ramah Anak

Meski RBRA di Kabupaten Cirebon terbilang masih sangat minim, upaya yang akan dilakukan DP3AKB hanya bertahan pada sosialisasi perlindungan ramah anak.



Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di Kabupaten Cirebon terbilang masih sangat minim. DP3AKB Kabupaten Cirebon melaporkan, baru ada 8 RBRA di Kabupaten Cirebon. Itu pun belum mendapat penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Padahal RBRA dinilai penting untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak benar-benar terwujud di dalam ruang bermain.

Kepala Seksi Pemenuhan Anak DP3AKB Kabupaten Cirebon Sri Lina Andriana mengatakan, sejumlah upaya akan dilakukan pada tahun ini guna mendorong tempat bermain ramah anak bisa bertambah.

Pertama, ia akan meminta Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kecamatan agar mengupayakan berdirinya RBRA di setiap kecamatan.

Kedua, ia akan terus mendorong pemdes untuk membangun tempat bermain ramah anak. Meskipun upaya yang telah dilakukannya pada tahun kemarin itu masih belum berhasil lantaran banyak program pemdes yang memprioritaskan pada penanganan pandemi covid-19.

“Karena DP3AKB tidak memiliki anggaran untuk mendirikan RBRA, maka kita mengarahkan Muspika dan Pemdes untuk mengalokasikan anggarannya,” kata Sri.

Ketiga, DP3AKB berupaya menyosialisasikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon mengenai standarisasi sekolah ramah anak. Terakhir, DP3AKB akan melaksanakan lokasi fokus Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) dari Provinsi Jawa Barat.

“Kebetulan tahun ini lokus DRPPA Jawa Barat



H. Hanifah (anggota komisi 4)



yang ditunjuk adalah desa-desa di Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Sementara ini kami sudah melaksanakan di Desa Purbawangunan dan Babakan Gebang," ungkapnya.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Hanifah menilai RBRA dapat membangun perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik anak. Keberadaan RBRA dapat membangun komunikasi yang efektif, kreatif dan karakter yang baik bagi anak. Sehingga dampaknya rasa percaya diri anak akan terbangun tinggi.

"Masa *golden age* atau peri-

ode emas anak merupakan masa awal kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan anak yang begitu pesat. Sebab 50% kecerdasan orang dewasa mulai terbentuk pada masa anak ini," jelas Hanifah.

Karena itu, untuk mewujudkan lebih banyak RBRA di Kabupaten Cirebon, Hanifah berpesan kepada DP3AKB untuk fokus pada tiga hal. Pertama, mengusulkan pembangunan RBRA di setiap desa.

Jika saat ini Pemkab Cirebon belum mampu mendirikan RBRA di setiap desa lantaran

terbatasnya anggaran, namun semangat tinggi dalam mewujudkan RBRA harus tetap ada pada DP3AKB.

Hanifah berharap DP3AKB berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) mengenai aturan dan teknis usulan pembangunan RBRA di setiap desa.

Kedua, lanjut Hanifah, menginisiasi pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pendirian RBRA.

Ketiga, Hanifah berharap, Surat Edaran (SE) tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) dan Optimalisasi Dana Desa kembali diberlakukan. Sehingga desa memiliki kewajiban mengalokasikan sebagian dana desa untuk kegiatan taman bermain ramah anak.

"Artinya jika kuwu tidak menindaklanjuti SE tersebut, maka dikenakan sanksi. Tetapi sebelum turun sanksi harus ada evaluasi terlebih dahulu. Kemudian dianalisis dan ditetapkan sanksinya seperti apa. Ini jadi catatan DPMD," ungkapnya.

Hanifah menegaskan, pemerintah berkewajiban memberdayakan dan melindungi anak. Karena itu pemerintah daerah diharapkan tidak saling lempar tanggung jawab dalam upaya mendirikan RBRA. Pemerintah daerah harus saling berpacu mewujudkan amanat Kementerian PPPA ini.

"Dinas-dinas harus bisa membangun banyak RBRA di Kabupaten Cirebon sesuai tupoksinya. Sebab anak adalah generasi penerus bangsa yang harus kita didik dan bina dengan proses yang menyenangkan," pungkasnya. • **Muizz**

Belajar dari Kabupaten Bogor Miliki Taman Ramah Anak Tersertifikasi

Kabupaten Bogor meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) karena keseriusannya menyediakan ruang ramah anak yang memadai. Bagaimana langkahnya?



Kabupaten Bogor, merupakan satu dari 28 daerah yang telah berhasil lolos standarisasi dan sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) pada tahun 2019. Tak heran jika Kabupaten Bogor berhasil meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA).

Tercatat per tahun 2019, Kabupaten Bogor memiliki 78 Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hingga saat ini Pemkab Bogor terus mengupayakan ketersediaan RTH. Salah satu RTH yang ramai digandrungi warga Bogor ialah Taman Cibinong Situ Plaza (CSP) yang berada di tengah-tengah Kota Cibinong tepatnya di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong.

Taman Cibinong Situ Plaza merupakan salah satu RTH di Kabupaten Bogor yang sudah terverifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai ruang bermain ramah anak sejak tahun 2019.

Predikat ini tidak serta merta diperoleh cuma-cuma. Kegigihan dan kerjasama antara *stakeholder* serta dinas-dinas terkait menjadi kunci keberhasilan membangun taman bermain anak sehingga dinobatkan Kabupaten Layak Anak.

Tak mudah untuk mendapatkan sertifikasi RBRA dari Kementerian PPPA. Diketahui, ada 13 persyaratan RBRA yang harus dipenuhi yaitu lokasi,



pemanfaatan, kemudahan, material, vegetasi penghawaan udara, peralatan bermain, keselamatan, keamanan, kesehatan dan kebersihan, kenyamanan, pencahayaan, dan pengelolaan.

Namun selain persyaratan tersebut, ada 8 prinsip yang juga harus diperhatikan dalam pengembangan RBRA diantaranya: gratis, non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, aman, selamat, nyaman, kreatif dan inovatif, serta sehat.

Berdasarkan *Surveillance Audit* (SVA) yang dilaksanakan Kementerian PPPA pada tahun

2019, Taman Cibinong Situ Plaza Kabupaten Bogor telah memenuhi standar sebagai ruang bermain ramah anak dengan fasilitas lengkap dan aman.

Seperti RBRA pada umumnya, CSP juga memiliki *Playground* yang dapat mendorong sistem motorik anak-anak mulai dari perosotan, ayunan, jembatan gantung, dan terowongan. Selain itu, untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pada anak-anak, taman bermain tersebut dialasi dengan rumput khusus yang terawat.

Selain tempat bermain untuk

anak, CSP juga memiliki lapangan skateboard untuk para remaja sekaligus sarana prasarana yang memadai, seperti tempat sampah, toilet, gazebo, dan musala. Taman juga dilengkapi dengan lampu-lampu yang berkualitas, sehingga taman akan tetap terang saat malam hari.

Menurut data BPS tahun 2021, di Kabupaten Bogor terdapat 1.848.546 anak berusia 0-19 tahun. Beragam kebijakan strategis dan berkelanjutan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Saat ini, dalam rangka meningkatkan predikat KLA Kabupaten Bogor telah menerbitkan sejumlah regulasi diantaranya, Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Perbup Nomor 39 tahun 2021, tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Terakhir, Perbup Nomor 67 tahun 2021 tentang Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong perangkat daerah untuk berinovasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dengan didasarkan kepada lima klaster, yaitu klaster hak sipil, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, perlindungan khusus.

Dengan adanya Taman CSP dan beberapa kebijakan yang mengatur tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kelima klaster itu pun bisa terwujud. Saat ini, Taman Cibinong Situ Plaza menjadi parameter taman ramah anak yang sesuai standar. •Par

TPS Mertapada Kulon Mulai Dibersihkan

Masyarakat Blok Manis RT 004, RW 002 Desa Mertapada Kulon kini bisa bernafas lega. Tumpukan sampah yang menggunung sepanjang ratusan meter akhirnya mulai dibersihkan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi bersama Kabid Pertamanan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon serta Pemdes Mertapada Kulon, meninjau langsung jalannya proses pengangkutan sampah.

Ketua DPRD Mohamad Luthfi menjelaskan, proses pengangkutan sampah yang diperkirakan

mencapai 90 ton tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 7 hari. Sampah-sampah tersebut akan diangkut ke TPA Gunung Santri, Kecamatan Palimanan dengan mengerahkan 30 armada truk pengangkut sampah, sementara sebagian sisanya akan dilakukan penimbunan.

Luthfi pun mengatakan, jika tahun 2024 Kabupaten Cirebon harus bebas dari sampah.

“Kita tengah mendorong sampah-sampah di desa mulai diatasi dan tahun 2024 produksi sampah yang dihasilkan masyarakat harus bisa dikelola dengan baik,” jelasnya.



Sebelum dibersihkan



Setelah dibersihkan



Pisah Sambut Kepala Kejari

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi, menghadiri acarapisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Cirebon yang sebelumnya dijabat Hutamrin, SH, MH kini digantikan Fajar Syahputra, SH, MH. Dalam kesempatan itu, Luthfi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Hutamrin atas dedikasi dan kebersamaan yang terjalin selama ini dalam penegakan hukum di Kabupaten Cirebon.

“Melalui program Restorasi Justice yang diusung Pak Hutamrin, kita merasakan banyak perubahan khususnya bidang pelayanan hukum. Kita ucapkan

terimakasih kepada Pak Hutamrin atas kinerjanya selama ini,” ujar Luthfi.

Momen haru bercampur bahagia tersebut, juga dihadiri Bupati Cirebon Drs H Imron, M Ag dan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih beserta segenap unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon.

Hutamrin kini mengemban tugas baru sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejaksaan Tinggi Lampung sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-515/C/08/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan.



Gempita Perayaan HUT Kemerdekaan

Setelah lebih dari 2 tahun tak digelar secara meriah akibat pandemi covid-19, tahun ini DPRD Kabupaten Cirebon kembali menggelar peringatan HUT RI ke 77 dengan riuh. Gempita perayaan dihadiri puluhan keluarga besar anggota DPRD beserta seluruh pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Meski hanya diikuti jajaran internal, antusias dan hiruk pikuk bahagia sangat terasa.

Berbagai perlombaan seperti olahraga dan permainan khas 17 Agustus yang menambah keseruan

peringatan pun tak luput dilakoni. Seluruh jajaran anggota DPRD Kabupaten Cirebon satu-per satu saling berkompetisi.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi mengatakan, momentum HUT RI ke 77 bisa menjadi ajang untuk lebih mempererat persatuan lembaga yang ia pimpin.

“Mari kita isi kemerdekaan ini dengan saling menguatkan. Dengan semakin eratnya persatuan, kita berharap akselerasi pembangunan Kabupaten Cirebon dapat terwujud,” ujarnya saat mengisi sambutan.



DPRD Apresiasi *Green Service* Bank Sampah

Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77, Polresta Cirebon meluncurkan program *Green Service* yang memungkinkan masyarakat dapat membuat SIM, SKCK hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) cukup dengan menukarkan sampah plastik.

“Green Service ini merupakan kado dari Polresta Cirebon dan Pemkab Cirebon, khususnya DLH Kabupaten Cirebon untuk menyambut HUT ke-77 RI,” ujar Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman.

Langkah tersebut diapresiasi Ketua DPRD Kabu-

paten Cirebon Mohamad Luthfi. Menurutnya terobosan dari Kapolresta Cirebon dapat menjadi alat paksa bagi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Cirebon untuk lebih peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan. Khususnya dalam mewujudkan Kabupaten Cirebon bebas sampah pada tahun 2024 mendatang.

“Kami DPRD Kabupaten Cirebon mendukung penuh inovasi ini, karena salah satu target pembangunan Kabupaten Cirebon adalah bebas sampah pada tahun 2024,” kata Luthfi.



Gapura Simbol Jadi Sasaran Vandalisme



Assalamu'alaikum wr wb.

Yang terhormat Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Saya Alif (32), ingin melaporkan kondisi gapura perbatasan Kabupaten Cirebon-Indramayu, yang berada di jalur Pantura, Kecamatan Susukan karena begitu memprihatinkan. Terlihat di beberapa bagian gapura dipenuhi coretan-coretan.

Tak hanya menjadi sasaran pelaku vandalisme, struktur besi dari gapura megah tersebut tampak mulai keros. Ditambah lagi ada bagian yang hilang, seperti lambang Kabupaten Cirebon yang hanya menyisakan tagline saja. Saya harap kedepan ada upaya untuk menjaga serta merawat aset milik Kabupaten Cirebon, tak terkecuali gapura yang notabene menjadi salah satu monumen kebanggaan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Alif/Mahasiswa/Kaliwedi)



Petani Garam Keluhkan Lahan Terendam Banjir

Sebelumnya perkenalkan, saya Hendra (32) asal Pangenan Pangenan. Seperti yang diketahui, sejumlah petani garam yang berada di wilayah pantai utara Cirebon saat ini tidak dapat memproduksi garam karena tambak mereka terendam banjir. Dampak banjir rob dan cuaca yang tidak menentu menyebabkan penurunan produksi garam khususnya di wilayah desa kami.

Sebagai salah satu pihak yang terdampak, saya menaruh harapan besar kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon agar kawasan pesisir utara Cirebon, khususnya sentra produksi garam dapat segera benahi. Meski banjir rob merupakan hal biasa, namun kita berharap ada upaya dari dinas untuk memberi solusi agar lahan petani tak banjir. Sehingga produksi garam tetap bisa dilakukan.

Kita harap ada tindak lanjut dari Pemkab Cirebon. Terimakasih sebelumnya.

(Hendra/Petani/Pangenan)

Perlu Normalisasi Sungai Kreyo

Salam hormat Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Pendangkalan sungai yang terjadi di sebagian Kecamatan Klangeran khususnya Desa Kreyo kian mengkhawatirkan. Akibat pendangkalan tersebut, aliran air dari sungai yang bersebelahan dengan Jalan Nyi Mas Endang Geulis mengalami penyempitan. Sehingga saat musim hujan tiba, debit air hingga merendam sebagian tubuh jalan. Sehingga menimbulkan potensi bahaya bagi mereka yang melintas.

Ketika musim kemarau seperti sekarang, memang tidak ada masalah yang ditimbulkan. Akan tetapi, semuanya menjadi semakin kompleks ketika musim penghujan tiba. Kiranya masalah tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun dinas terkait, agar dengan segera melakukan upaya normalisasi sungai. Sehingga masalah yang selama ini terjadi bisa dicegah.

(Krisna/Pelajar/Panguragan)



Bekas Pabrik Jadi Tempat Mesum

Assalamu'alaikum wr wb.

Terimakasih sebelumnya kepada Cirebon Katon berkenan menerbitkan. Saya Kadmira (52) ingin menyampaikan keluhan terkait aktifitas sejumlah oknum yang memanfaatkan sepinya kondisi bekas pabrik gula Gempol. Dimana diduga sering digunakan untuk tempat mesum.

Bahkan tak jarang, aksi tersebut mereka lakukan ketika siang hari. Keberadaan bekas pabrik gula yang dikenal angker tersebut tak sedikitpun menghalangi niat para oknum pasangan mesum.

Ironisnya lagi, pelaku mesum banyak berasal dari luar daerah dan didominasi anak remaja. Hal ini tentu menodai nama baik daerah khususnya Kecamatan Palimanan. Saya harap kedepan pemerintah ataupun pihak berwenang dapat bertindak tegas untuk memberantas kebiasaan negatif tersebut.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Kadmira/52/Palimanan)

Kripik Tempe Ocien Terjual Hingga ke Negeri Ginseng

Kripik tempe milik guru honorer ini semula hanya dijual ke warung-warung, sebelum Hendra berhasil mengeksportnya ke Keroa Selatan. Bagaimana bisa?



Jika berkunjung ke Kabupaten Cirebon, jangan lupa cicipi pula kuliner dan jajanan khasnya. Saat ini banyak kudapan lokal warga Cirebon yang sudah bisa dibeli melalui toko oleh-oleh di Cirebon dan sekitarnya, salah satunya Kripik Tempe Ocien.

Kripik Tempe Ocien merupakan salah satu produk UMKM milik Hendra Agustira yang telah dirintis sejak 2014 silam.

“Saya mulai usaha ini dari nol sejak tahun 2014, awalnya Ocien ini usaha sampingan karena saat itu saya masih menjadi guru honor,” ungkap Hendra.

Hendra bercerita perjalanan panjang bisnisnya sebelum dikenal saat ini. Hendra membuat kudapan tersebut di Desa Gempol, Kecamatan Palimanan yang ia jual ke warung-warung dan tetangga terdekat. Dengan menggunakan modal seadanya, Hendra menjajakannya bersama Yeni, istrinya.

Sebagai guru honorer, Hendra tak memiliki pengalaman dalam dunia kuliner, begitupun dengan Yeni. Namun dengan semangat tinggi mereka selalu berusaha mengembangkan kripik tempe itu agar dapat dikenal banyak orang.

“Saya merasa harus menyeriusi usaha saya, akhirnya menginjak 1 tahun saya ikuti berbagai pelatihan yang diadakan Disperdagin, Dinas UMKM, Pemprov Jabar maupun BUMN,” jelas Hendra.

Setelah mengikuti banyak pelatihan usaha, Hendra mengaku bertemu dengan banyak pelaku UMKM lainnya. Tak ayal, ia juga banyak mendapatkan pelajaran melalui cerita inspiratif dari masing-masing teman bisnisnya.

Kemudian, dengan berjalannya waktu Kripik Tempe Ocien mulai banyak dikenal oleh masyarakat sampai menghiasi toko oleh-oleh di Cirebon, Kuningan,



dan Bandung.

Kripik Tempe Ocien memiliki beberapa varian rasa, seperti original, balado, dan pedas. Harganya juga relatif murah, mulai Rp 2 ribu hingga Rp 20 ribu sesuai dengan ukuran.

“Selain di toko oleh-oleh, Ocien juga dijual di Indomaret dan marketplace seperti blibli, Tokopedia, dan Shopee. Selain itu, beberapa *reseller* kami juga ada yang dari luar Jawa,” ungkap Hendra.

Hendra menuturkan, melalui berbagai macam pelatihan dia telah banyak mendapatkan pe-

lajaran baru untuk pengembangan usahanya, dari cara produksi, *branding*, pemasaran ekspor-impor.

“Karena sudah tahu cara impor dan ekspor, tahun 2019 saya bekerjasama dengan salah satu perusahaan di Korea Selatan, hingga akhirnya sejak saat itu produk saya bisa dipasarkan di sana,” tuturnya.

Selain di Negeri Ginseng, Hendra juga menjalin kerjasama dengan perusahaan ekspornya yaitu Singapura dan Australia. Ia akui, semua jalan itu didapatkan setelah mengikuti

banyak pelatihan.

Namun dampak pandemi yang baru-baru terjadi ternyata juga dirasakan oleh Hendra. Omzetnya sempat anjlok 80% dari sebelum pagedbluk.

“Dulu setiap bulan pernah mencapai Rp 100 juta, tapi semenjak pandemi anjlok sampai 80%. Rata-rata kalau sekarang paling banter Rp 20 juta,” jelas Hendra.

Meskipun begitu, Hendra tetap bersyukur apapun yang terjadi. Karena berkat kerja kerasnya bersama istri, usaha yang mulanya hanya sampingan kini menjadi ladang utama perekonomian keluarga.

Saat ini Hendra memiliki 7 karyawan untuk membantu produksi Kripik Tempe Ocien. Dia mengaku akan terus berusaha untuk mengembangkan usahanya tersebut, agar lebih dikenal lagi mancanegara.

Hendra juga berharap, pemerintah di Kabupaten Cirebon bisa lebih memperhatikan pelaku Usaha Mikro seperti nya. Bisa memfasilitasi dan melibatkan pelaku UMKM dalam pameran-pameran sebagai bentuk memperkenalkan produk lokal.

“Saya harap pemerintah lebih memperhatikan pelaku UKM seperti saya, mulai dari memfasilitasi dalam legalitas atau perizinan. Lalu saya juga berharap, Kripik Tempe Ocien bisa menjadi salah satu souvenir setiap ada tamu dari luar,” harapnya.

Bagi Hendra, pemerintah adalah jembatan bagi pelaku UMKM memasarkan produk agar bisa dikenal oleh masyarakat luas.

“Dan secara tidak langsung semua itu tentu juga akan mengangkat nama Kabupaten Cirebon ketika ada UMKM yang sukses hingga mancanegara,” pungkasnya. •Par

Ajarkan Makna Kemerdekaan Sejak Dini

Setiap orang berhak mengungkapkan rasa bahagiannya dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan Indonesia.

Tak terkecuali bagi anak-anak. Tampak tersirat pada wajah mereka yang berbunga-bunga merayakannya meski dengan cara sederhana. Berlarian dengan membawa seutas bendera ternyata sudah cukup menyenangkan.

Mengajari mereka mengenai arti kemerdekaan tentu bukan hal yang mudah dan sederhana. Dengan mengetahui pentingnya arti kemerdekaan, anak-anak akan memiliki kebanggaan yang tinggi pada negeri.

Mereka diharapkan tumbuh menjadi insan baik dan mampu memaknai kemerdekaan sesuai dengan versinya sendiri. •Mir





Asep Sutandi SE, M.Si Maniak Gowes

Sebelum memilih gantung sepeda, Asep begitu menggemari gowes. Bersama kawan komunitasnya ia telah menempuh berbagai jalur jalanan.

Bagaimana kisahnya?

Asep menghela nafas saat ditanya hobinya. Pria kelahiran 1973 itu sempat bingung. Asep mengingat-ingat kenangan yang sempat menjadi rutinitasnya setiap akhir pekan. Sebelum ia divonis sakit, Asep dikenal maniak gowes. Hampir seluruh wilayah Cirebon hingga Kuningan (Ciayumajakuning) telah ia tempuh dengan bersepeda.

“Memang sebelum sakit waktu itu, saya gemar banget gowes tiap hari Sabtu atau libur kerja dan itu sudah muter sewilayah III,” ujar pemilik nama leng-





kap Asep Sutandi.

Asep saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Sebelumnya ia pegawai di Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon.

Hobinya menggemari olahraga sepeda diawali sejak ia masih berkarir di Sekda. Setiap hari libur Asep akan menghabiskan waktu bersepeda bersama kawan sekantornya.

“Sejak tahun 2011 saya mulai aktif gowes bersama teman-teman pejabat, setiap Sabtu dulu saya rutin olahraga sepeda, mulai dari habis subuh sampai siang dan sore,” ungkapnya.

Olahraga sepeda banyak digandrungi para pejabat saat itu. Bagi Asep, bersepeda selain untuk upaya menjaga kesehatan tubuh, juga ajang kebersamaan.

“Dulu kayanya pada suka sama sepeda, dan menurut saya selain butuh untuk kesehatan tubuh juga bisa menjadi waktu

bersama dengan teman-teman,” kata Asep.

Asep merasa senang setiap kali bersepeda, pasalnya tubuh dan jiwanya merasa bugar. Selain itu, jarak sejauh manapun akan terasa menyenangkan karena dilakukan secara bersama.

“Saking cintanya sama gowes, cuaca panas atau hujan juga kami lawan. Bahkan dulu sampe sepedanya dipanggul,” kenangannya terkekeh.

Kecintaan itu juga menjadi alasan, Asep membentuk komunitas sepeda di sekitar lingkungan Sekda yang bernama “Lengko”. Bersama teman-temannya di Lengko, Asep gowes di berbagai tempat.

“Dulu jalur favorit dan menjadi rutin kita lewati itu Cisaat, Sindang Jawa dan Mandirancah,” ucap Asep.

Pria alumnus UGM Yogyakarta itu juga menambahkan, awalnya hanya mengajak teman kantor yang dekat saja untuk bergabung di Lengko, namun

seiring waktu anggota Lengko semakin bertambah.

“Awalnya hanya 8 orang yang anggota Lengko, tapi semakin kesini anggota Lengko sudah mencapai 50 orang,” jelas Asep.

Hampir semua anggota komunitas merupakan pejabat pemerintahan di lingkungan Kabupaten Cirebon. Asep mengaku banyak hal yang tidak bisa dilupakan. Apalagi ketika ia gowes bersama teman komunitasnya ke Subang sampai Ciater.

“Saya masih ingat ketika almarhum Sekda Joni mengusulkan gowes dari Tangkuban Perahu sampai Ciater, itu sangat mengesankan,” ucap Asep.

Kisah lainnya yakni saat gowes dari Kota Banjar ke Pangandaran. Asep harus melewat berbagai jalur terjal nan jauh dan saat itu kerjasama tim sangat diperlukan.

“Dulu pernah gowes dari Banjar sampai Pangandaran, itu jarak yang lumayan jauh, tapi kita tetap mengutamakan kebersamaan. Jika ada yang tertinggal kita akan menunggunya, baru akan mulai lagi,” katanya.

Namun saat ini Asep telah gantung sepeda. Di usianya yang tak lagi muda ia tak kuat lagi untuk gowes. Bersepeda hanya menjadi kenangan yang tidak pernah terlupakan. Kini hari liburnya Asep gunakan bersama keluarga dengan tetap berolahraga ringan untuk menjaga kebugaran tubuh. Belum lagi di usianya yang rentan terkena penyakit.

“Sekarang saya sudah tua, teman-teman saya yang lain juga kabarnya sudah gantung sepeda. Tapi saya masih ingat kenangan saat gowes bersama. Sekarang paling setiap Sabtu, main dengan keluarga dan olahraga ringan di sekitar rumah saja,” pungkaskannya. •Par

Haryanto, SH

Belasan Tahun Berkarir di DPRD

Yanto memulai karirnya di sekretariat DPRD. Meski sempat dimutasi, ia selalu kembali dipercaya membantu tugas legislator. Bagaimana kisahnya?

Pria satu ini dikenal *humble* nan ramah saat bertatap muka. Antusiasnya sangat terlihat saat ia dihujani pertanyaan.

Yanto merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia lahir di Desa Lemahtamba, Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

Pemilik nama lengkap Haryanto, saat ini menjabat Kasubag Fasilitas dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Karirnya di pemerintahan tergolong unik. Sejak pertama kali menjadi honoror, Yanto sudah bekerja di DPRD.

Tepatnya tahun 2004, saat lulus dari Institut Agama Islam (IAI) Jember, ia dipercaya untuk membantu tugas DPRD. Sejak saat itu, Yanto menetap dan hanya sekali dipindahtugaskan.

Pada tahun 2020 ia diminta untuk mengisi jabatan Sekretaris Lurah Tukmudal, Kecamatan Sumber.

“Saya dari awal disini dan saya pindah dari ge-





dung ini sebentar hanya 1,5 tahun. Kemudian kembali lagi di sini," kata pria lulusan SMA Klangeran tersebut.

Setelah mengabdikan 10 tahun, Heryanto pun akhirnya diangkat PNS pada 2014 silam.

Selama di DPRD, Yanto telah merasakan pahit manisnya bekerja. Ia pun sempat menjadi sekretaris pribadi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2015. Selanjutnya ia dipindahkan menjadi notulen Komisi membantu kinerja anggota DPRD dalam pengawasan.

"Saya sudah merasakan semua selama jadi notulen dari Komisi I sampai IV. Istilahnya: pahit manis sudah saya rasakan," kata Yanto.

Lama bergelut di Komisi, Yanto pun juga sempat dimutasi ke bagian keuangan hingga 3 tahun lamanya.

Akhirnya ia pun menetap di Kasubag Fasilitas dan Pengawasan hingga sekarang

"Tahun 2021 akhirnya saya dipanggil lagi kesini di kantor DPRD Kabupaten Cirebon se-

bagai Kasubag Fasilitas dan Pengawasan," jelasnya.

Belasan tahun bekerja di DPRD Kabupaten Cirebon, Yanto pun telah mengalami suka dan duka dalam perjalanan.

"Banyak mas suka-dukanya dari mulai ke luar kota sampai meninggalkan keluarga ketika tugas keluar kota," jelasnya.

Yanto menceritakan pengalaman yang berkesan selama membantu tugas DPRD. Ia mengagumi kinerja sosok Sri Bendera Murni, seorang yang tegas dan lugas menurutnya saat bekerja. Ibu Sri, sapaan akrabnya, memiliki sifat yang serius. Terutama dalam pembahasan sesuatu. Tak pernah ada pembahasan kosong setiap rapat dengannya. Selalu berisi.

"Misalnya sedang bahas anggaran. Dari dulu kalau Ibu Sri itu setiap bahas pasti bakal serius bahkan pembahasannya bisa sampai dini hari jam 02.30 pagi. Itu berkesan sekali," kenangannya menceritakan.

Karir Yanto yang dinilai cukup gemilang ternyata bukan

didapat karena faktor keluarga. Kedua orangtua Yanto hanya seorang petani desa.

"Ya memang kalau ibu bapak saya petani. Saya juga bersyukur bisa seperti ini. Minimal mengangakat derajat orangtua," katanya.

Selain berkarir di DPRD Kabupaten Cirebon, Yanto ternyata memiliki bisnis kecil-kecilan yang ia lakukan bersama istri. Yanto berjualan sprei di daerah Sumber dan Susukan.

"Kalau lagi libur kerja, kita jualan sprei di rumah bantu istri. Kita juga jualan di lokasi car free day di Sumber," jelas Pria yang memiliki hobi bulutangkis itu.

Sudah 5 tahun lamanya, Yanto berjualan sprei. Produknya sudah terjual di pasar daerah seperti: Pasar Sumber, Cipejuh, Gebang hingga Jagasatru. Selain itu ia juga telah bermitra dengan berbagai toko.

"Produk kami sudah masuk pasar-pasar, walaupun bukan produk asli buatan saya tapi sudah banyak yang pesan," pungkaskannya. •Kus

Pastikan Hotel Tertib dan Ikuti Aturan

Hotel DJ dilaporkan mengganggu ketertiban umum dan takenuhi retribusi untuk desa. Komisi I pun turun tangan menyidak. Seperti apa?



Hotel DJ yang beralamat di Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug dilaporkan telah melanggar ketertiban umum. Warga mengeluh kebisingan hotel saat menggelar acara tertentu. Selain itu ada dugaan Hotel DJ yang tak mau membayar retribusi untuk desa. Untuk itu Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon bergegas menyidak.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi mengatakan sidak kali ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi dan ketertiban hotel.

“Terutama soal tertib lalu lintas dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Karena kami mendapat laporan ada konflik yang terjadi antara hotel dengan pihak sekitar,” ujarnya.

Junaedi menyampaikan, Hotel DJ merupakan perintis awal berdirinya hotel di wilayah timur Ka-

bupaten Cirebon. Oleh karenanya, diharapkan untuk taat terhadap regulasi sehingga tak memicu permasalahan dengan masyarakat sekitar.

“Karena sering kali permasalahan justru terjadi dengan masyarakat sekitar karena ada dampak yang dirasakan,” kata Junaedi.

Meski demikian, General Manager Hotel DJ Sidiq mengungkapkan, Hotel DJ telah mengikuti aturan yang berlaku dan tak mengganggu ketertiban sebagaimana laporan warga kepada DPRD Kabupaten Cirebon. Menurutnya semua proses perizinan telah ditempuh meski sebagian masih ada yang harus diperpanjang.

“Namun pada faktanya kita taat hukum saat ini perizinan yang harus diperpanjang sedang dilakukan,” ungkap Sidiq.



Seperti diketahui, perkembangan hotel di wilayah Kecamatan Ciledug berawal dari adanya zona industri Kabupaten Cirebon dan dibukanya pintu Tol Ciledug sehingga bisnis perhotelan mulai begerak.

Hotel DJ memiliki 31 kamar dengan tipe moderat, superior dan delux. Ada juga *ball room* dengan kapasitas 800 orang dan *meeting room* dengan kapasitas 60 orang. Untuk kegiatan, hotel bintang satu itu juga menyediakan ruang family karaoke.

Saat ini Hotel DJ memiliki 16 pegawai, meski dua tahun terakhir dilanda pandemi covid-19, jumlah pegawai tersebut tak berkurang. Sementara status

tanah hotel merupakan hak milik perusahaan.

Sidiq juga menuturkan, Hotel DJ telah bekerjasama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Cirebon dan sering menjadi tempat kegiatan maupun pertemuan. Sementara dalam menjaga hubungan dengan masyarakat, kata Sidiq, Hotel DJ telah melakukan bina lingkungan di daerah sekitar.

Selain itu, Sidiq menerangkan, Hotel DJ telah menemupuh seluruh tahapan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan tidak ada satu pun yang terlewat.

“Sebab jika salah satu tidak masuk atau belum ditempuh,

maka tidak akan bisa dikeluarkan perizinannya dan tentunya kami tidak bisa beroperasi,” terangnya.

Menurut Sidiq, laporan warga mengenai ketertiban Hotel DJ, diduga dilakukan oleh oknum warga. Diakui, setiap kali Hotel DJ akan menggelar acara, konsumen akan diminta membayar tarif retribusi untuk perizinan sejumlah Rp 900 ribu sekali acara oleh oknum desa.

“Dan mereka beralasan itu sudah jadi aturan desa. Sehingga memang beberapa kali kami tolak. Sehingga munculah konflik antara kami dengan oknum pihak desa. Bagi kami itu kalau Perdes itu benar ada mengapa sangat berbeda dengan aturan daerah,” kata Sidiq.

Padahal sebagaimana imbauan dari Satpol PP, saat akan menggelar acara, Hotel DJ cukup berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan dan Polsek setempat dan Hotel DJ telah mematuhi.

“Awalnya kami melibatkan desa. Namun setelah mendapat penjelasan dari Satpol PP, kami memutuskan untuk tidak lagi melibatkan desa. Karena adanya retribusi sejumlah Rp 900 ribu sangat memberatkan dan banyak dikeluhkan oleh konsumen kami,” ungkapnya.

Karena itu Sidiq berharap, adanya sinergitas aturan antara Pemkab Cirebon dengan pemerintah desa setempat. Sehingga manajemen hotel dan pengunjung merasa aman dan nyaman.

Mendengar itu, Junaedi berjanji Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP dan pemdes setempat.

“Karena ini masih sifatnya dugaan kami akan fasilitasi kebenaran soal pungutan sejumlah itu,” tandas Junaedi. • Iz

Sambut Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi

Luthfi ingin Kabupaten Cirebon dapat menerjemahkan arahan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan menyongsong kebangkitan ekonomi. Apa saja?



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar paripurna istimewa untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 77.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga SKPD beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Setelah mendengarkan pidato kenegaraan presiden, giliran Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi menyampaikan sambutan. Luthfi mengatakan, HUT Kemerdekaan RI ke 77 ini merupakan momentum untuk kebangkitan Indonesia setelah terpuruk pandemi Covid-19.

“Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk bangkit, setelah sekian lama terpuruk karena pegebluk yang berdampak terhadap sektor kehidupan,” ujar Luthfi.

Menurutnya, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa pesan yang sangat penting dalam pidato kenegaraan. Salah satunya mengenai tema pembangunan dan peningkatan produktivitas bangsa Indonesia. Presiden ingin tahun ini pendapatan negara dari sektor pajak dan retribusi dapat meningkat.

“Upaya itu akan diwujudkan melalui hilirisasi semua produk-produk Indonesia agar bisa ditingkatkan produktivitasnya. Dengan hilirisasi, nikel akan dapat diekspor seperti baja yang telah lebih dulu diekspor dengan harga fantastis Rp 340 triliun naik



18 kali lipat,” tambah Luthfi.

Luthfi pun mengaku setuju dengan agenda sekaligus harapan Presiden Jokowi. Pasalnya hal tersebut akan berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi bangsa. Tak dipungkiri, ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling berdampak seiring badai pandemi covid-19.

“Saya setuju dan sepakat, karena akan langsung berdampak pada pemulihan ekonomi. Berikutnya, beliau juga mengatakan mengenai green ekonomi. Pak Presiden ingin Indonesia punya kawasan industri

terbesar di dunia,” ungkapnya.

Politisi PKB itu pun berharap Kabupaten Cirebon dapat melakukan hal serupa. Ia ingin sektor industri dapat terus didorong agar meningkat. Sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di Kabupaten Cirebon.

“Kami juga ingin mendorong industri di Kabupaten Cirebon bisa meningkat secara signifikan seperti industri olahan, dengan harapan kawasan yang didorong pemerintah memiliki konsep kawasan industri hijau,” jelas Luthfi.

Selain itu, Luthfi menuturkan

pentingnya digitalisasi UMKM. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, terdapat 19 juta pelaku UMKM yang telah masuk dalam sistem ekonomi digital. Oleh karenanya, Luthfi berharap pelaku UMKM Kabupaten Cirebon dapat terlibat dalam ekosistem digital.

“Saya setuju dengan agenda ini, kita mendorong teman-teman UMKM di Kabupaten Cirebon bisa masuk di ruang-ruang ekonomi digital. Namun yang mendesak dan penting adalah kehadiran negara untuk memfasilitasi teman-teman UMKM hingga bisa berkembang seperti yang diharapkan, dan ini menurut kami sangat penting dan juga prioritas,” tutur Luthfi.

Dia menambahkan, kehadiran pemerintah bagi pelaku usaha sangatlah penting. Pemerintah harus menjadi jembatan bagi dunia usaha sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dapat terwujud.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menginginkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus unggul. Oleh karenanya, Luthfi berharap Kabupaten Cirebon dapat menerjemahkan apa yang diharapkan presiden untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan berkarakter.

“Dari agenda yang disampaikan presiden, Kabupaten Cirebon juga harus memastikan SDM yang unggul dan berkarakter, dengan *soft skill* yang baik sehingga siap untuk masuk ke ruang industri serta mampu menerima tantangan zaman dan pembangunan yang semakin lebih baik,” kata Luthfi.

Luthfi mengajak seluruh masyarakat agar berjuang bersama, saling bergotong royong dan bahu membahu untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. •Par

Komisi I Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Sindangkempeng

Komisi I berharap, Pemdes Sindangkempeng dapat mengelola keuangan desa secara transparan serta mencegah hilangnya aset desa. Apa sarannya?



Hilangnya aset desa sering kali menjadi persoalan yang terjadi di pemerintah desa. Pemerintah desa tak lagi memiliki aset yang dapat meningkatkan pendapatan. Keadaan itu bahkan bukanlah hal baru setiap pergantian kuwu berlangsung.

Selain aset desa, pengelolaan keuangan dana desa juga sering kali disoal karena nihilnya transparansi penggunaan. Akibatnya gejolak konflik terjadi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Untuk itu Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon berkeinginan agar desa dapat mengelola keuangan dengan tepat serta mampu menjaga aset desa.

“Meski bukan hal aneh, namun kita berharap desa mulai serius menjaga aset desa. Kita berharap desa mau berkoordinasi dengan

kami terkait pengelolaan keuangan maupun bagaimana agar aset desa tak hilang,” ujar Abdul Rohman, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, saat mengunjungi Desa Sindangkempeng, Kecamatan Greged.

Rohman menuturkan, pemerintah desa senantiasa bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga penggunaan keuangan dan aset desa terkontrol langsung. Oleh karenanya untuk meminimalisasi permasalahan muncul dalam setiap keputusan, Pemdes Sindangkempeng diharapkan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa (musdes).

“Dalam setiap pengambilan keputusan itu harus berdasarkan Musdes,” tutur Rohman.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi mengingatkan tugas



kuwu yang dibantu perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, harus berdasarkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

“Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan aturan yang berlaku yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Ada empat asas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran,” jelas Junaedi.

Oleh karenanya, dalam menyusun APBDes, kata Junaedi, juga diharuskan berdasarkan hasil musyawarah secara bertahap dari musdus hingga dilanjutkan musdes.

“Tahapannya harus selalu dijalankan agar kedepannya

bisa lebih tertib administrasi,” ujar Junaedi.

Sementara untuk menjaga aset desa, Junaedi menyarankan Pemerintah Desa Sindang Kempeng beserta BPD segera membuat peraturan desa (perdes) tentang pengelolaan aset desa. Hal itu agar aset desa dapat terjaga dan dimanfaatkan.

“Kita berharap demikian, desa punya perdes mengenai aset desa. Setelah itu jangan lupa untuk legalitas terhadap aset tersebut, lakukan sertifikasi terhadap seluruh aset desa yang ada, bisa juga diajukan dalam program,” tambahnya.

Kuwu Sindang Kempeng Yaya mengatakan, setiap keputusan dalam mengambil kebijakan, Pemdes Sindang Kempeng

senantiasa melakukan musyawarah bersama. Termasuk dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan dana desa.

“Untuk pengelolaan keuangan kami sudah melakukan tahapannya mulai dari musdus pada saat awal perencanaan sampai dengan tahap penetapannya. Termasuk hal lain kita senantiasa berkoordinasi dengan BPD,” ungkap Yaya.

Pernyataan Yaya pun dibenarkan Ketua BPD Sindang Kempeng. Menurutnya, BPD selalu dilibatkan dalam setiap musyawarah yang dilakukan Pemdes Sindang Kempeng.

Sementara untuk mengenai aset, Yaya mengakui, hingga saat ini Desa Sindang Kempeng belum memiliki perdes tentang pengelolaan aset. Ia pun berjanji akan membahasnya dalam waktu dekat.

“Memang sekarang kita belum punya perdes. Itu menjadi masukan bagus buat kami agar segera punya payung hukum untuk mengelola aset,” tandas Yaya.

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Hj Diah Irwany Indriyati, S AP mengungkapkan, kunci sukses mengelola desa yakni terwujudnya harmonisasi antara kuwu, perangkat desa dan BPD. Pasalnya, saat terjadi ketidakharmonisan maka segala keputusan dan kebijakan akan tidak berjalan optimal.

“Makanya kita berharap Pemdes Sindang Kempeng bersama BPD membangun harmonisasi untuk menjalankan roda pemerintah desa berjalan lancar,” pungkasnya. •Kus

Komisi IV Minta Puskesmas Fokus Lakukan Verval Data

Kisruh dugaan KPM yang belum mendapat BPNT di Kecamatan Plered, diduga karena terjadinya perbedaan data penerima. Komisi IV tegaskan pentingnya verval data.



Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) se Kecamatan Plered banjir aduan. Sejumlah warga yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditengarai tak kunjung menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk bulan Juni dan Juli 2022. Para warga mendesak DPRD mengusut tuntas kejadian tersebut.

Mengetahui itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinsos Kabupaten Cirebon menyambangi langsung Kantor Kecamatan Plered dengan bertemu camat, kuwu dan Puskesmas.

Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Cirebon Gunarsa membantah bansos sembako yang dibeli melalui e-warung belum dicairkan. Menurutnya, BPNT justru telah dicairkan pada Juni dan Juli lalu. Karena itu ia meminta kepada para kuwu untuk menyosialisasikannya.

“Bila perlu kuwu menyosialisasikannya melalui spanduk. Tujuannya agar pemdes lebih transparan

dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” katanya.

Gunawan menduga, para warga yang belum menerima BPNT, disebabkan karena terjadinya perbedaan antara data Bank BNI dengan Puskesmas.

Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Nana Kencanawati menegaskan, keberadaan e-warung bertujuan untuk memakmurkan warung milik masyarakat. Namun ia menyebut masih banyak penyalahgunaan e-warung.

“Dengan kata lain banyak e-warung dadakan yang muncul saat penyaluran BPNT saja,” ujarnya.

Oleh karenanya Nana pun mengingatkan, agar Puskesmas memilih e-warung yang benar-benar milik masyarakat.

Nana juga menyoroti Bank BNI sebagai penyalur program BPNT yang dinilai perlu dievaluasi. Seharusnya e-warung yang merujuk ke BNI harus melalui rekomendasi kuwu dan Puskesmas.



“BNI selalu mengelak tidak tahu apa-apa. Makanya Komisi IV bulan depan akan berkunjung ke BNI pusat dalam rangka menanyakan kewenangannya sejauh mana,” jelas Nana.

Nana meminta agar Puskesmas fokus terhadap upaya kevalidan data keluarga tak mampu. Saat ini Dinsos Kabupaten Cirebon, kata Nana, memiliki program verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan selama dua kali dalam setahun.

“Masalahnya sudahkan Puskesmas Kecamatan Plered melakukan verval? Padahal dengan adanya program ini data KPM yang diajukan KPM akan aku-

rat. Sehingga tidak ada lagi salah sasaran dalam penyaluran bansos,” ungkapnya.

Gunarsa juga mengakui, kasus di Kecamatan Plered banyak warga mendadak mendaftarkan e-warung. Untuk itu ia meminta kepada Puskesmas agar melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke Kemensos .

“Puskesmas adalah bentengnya objektivitas verval. Maka itu Puskesmas harus serius,” tegasnya.

Ketua Forum Komunikasi Puskesmas Kecamatan Plered Surano mengaku tahun ini telah dua kali melakukan verval. Hanya saja masih banyak warung

yang mendaftar tanpa komunikasi dengan Puskesmas.

Ia pun meminta kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan nasib kesejahteraan Puskesmas. Pasalnya Puskesmas desa-desa Kecamatan Plered hanya mendapat honor Rp 700 ribu per bulan.

“Tahun ini kita sudah melakukan verval dua kali. Sekali verval mendapat honor Rp 250 ribu. Tapi untuk honor per bulan kita masih kurang karena hanya mendapat Rp Rp 700 ribu,” keluh Surano.

Mendengar itu, Nana Kencanawati meminta kepada pema dan pemdes untuk menaikkan honor pegawai Puskesmas. Sebab menurutnya Puskesmas adalah kunci keberhasilan validasi data warga penerima bansos.

“Kalau bisa Bupati menginstruksikan kuwu untuk menyelaraskan honor pegawai Puskesmas se-Kabupaten Cirebon. Sebab di lapangan seringkali kerja Puskesmas itu luarbiasa sampai jam istirahat pun masih kerja karena ada warga yang minta data,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Hanifah pun menambahkan, bahwa banyak pemerintah desa yang masih tidak memperhatikan nasib Puskesmas. Bahkan ia menyebut ada pemdes yang menghonor Puskesmas hanya Rp 150 ribu per bulan.

Menanggapi itu, Gunarsa mengatakan, Dinsos Kabupaten Cirebon berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengenai honor Puskesmas.

“Bila perlu dibuatkan Perbup untuk atur upah Puskesmas berdasarkan rumus. Bisa dilihat dari jumlah penduduk atau bagaimana,” katanya. •Iz

Mangrove Kasih Sayang Sempat Tutup, Kini Segera Buka dengan Nuansa Baru

Setelah sempat ditutup, wisata Mangrove Kasih Sayang akan segera kembali dibuka dengan tambahan fasilitas dan instragamable. Seperti apa?



Berawal dari keprihatinan warga Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon akan terjadinya pasang air laut. Sebagian warga yang ada di sekitar pesisir laut berinisiatif menanam pohon mangrove.

Dikomandoi oleh Nursin, pada tahun 2010 ia bersama 25 orang yang tergabung dalam kelompok nelayan Darma Kencana mulai menanam mangrove di pesisir pantai. Bibit tersebut merupakan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Cirebon.

“Waktu itu kami dapat bantuan bibit dari Dinas Kelautan kurang lebih 1500 batang. Alhamdulillah dari jumlah tersebut hampir semuanya berhasil tumbuh,” ujar Nursin.

Seiring waktu, tahun 2017 Nursin dan teman-temannya di kelompok nelayan diminta oleh DKP untuk menjadi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sekaligus merawat mangrove yang mereka tanam.

Diwaktu yang sama, DKP mengusulkan agar hutan mangrove dengan luas 7 hektare tersebut,



diolah menjadi ekowisata. Tak disangka ide tersebut ternyata sesuai dengan apa yang dipikirkan Nursin, sehingga dengan dibantu oleh Pemdes dan Pokmaswas, ia mulai membuat wisata mangrove.

Meski dengan fasilitas terbatas, tahun 2018 akhirnya wisata mangrove yang diberi nama ‘Kasih Sayang’ pun resmi dibuka. Dengan harga tiket masuk Rp 2.000, tak disangka, ribuan pengunjung membeludak datang.

“Saat itu *track* masih pendek. Fasilitas juga baru ada perpus-

takaan saja, tapi pengunjung satu hari pernah mencapai 1500 orang,” jelas Nursin.

Hal itu dibenarkan Ahmad, Sekretaris Desa Mundu Pesisir. Ia mengakui beberapa fasilitas hutan mangrove sempat rusak karena *overload* pengunjung. Ditambah sarana prasarana yang belum memadai sehingga pengelola wisata memilih untuk menutup sementara waktu.

“Saking banyaknya pengunjung, jalan sampai rusak. Apalagi memang belum ada toilet, jadi kalau pengunjung mau ke toilet

harus keluar dulu numpang ke rumah warga,” kata Ahmad.

Bagi Nursin, keputusan tersebut dirasa tepat. Mengingat fasilitas yang belum lengkap, justru akan membuat pengunjung tidak nyaman dan merasa bosan.

Meski demikian, Ahmad dan Nursin bersama Pokmaswas terus berupaya mengembangkan wisata mangrove tersebut. Ahmad mengatakan, telah mengajukan proposal bantuan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon.

“Satu minggu yang lalu saya diminta untuk segera membuat proposal. Katanya akan ada bantuan dana sebesar Rp 250 juta untuk wisata mangrove di Mundu Pesisir,” ungkap Ahmad.

Ahmad berencana, mengalokasikan bantuan untuk perbaikan jalan yang rusak, membuat spot swafoto, toilet, musala dan aula pertemuan.

Ahmad dan Nursin berharap, pemerintah akan bisa lebih memperhatikan potensi bahari di wilayah pesisir, salah satunya Hutan Mangrove Kasih Sayang yang ada di Desa Mundu Pesisir.

Ulur tangan pemerintah tentu akan membantu wisata Mangrove kembali tayang.

Namun demikian, Pemerintah Desa Mundu Pesisir memastikan wisata Mangrove Kasih Sayang akan dibuka kembali pada awal tahun 2023. Mereka berkeinginan, keberadaan hutan mangrove akan membantu menggaliatkan perekonomian warga.

“Insyallah kalau bantuan tersebut cair akan segera dilakukan pembangunan, dan targetnya akhir tahun ini atau awal tahun depan akan dibuka kembali. Sehingga adanya wisata ini akan membantu perekonomian warga sekitar,” tandas Nursin. •Par

Panguragan Lor

Kebut Bangun Jalan Desa

Pemdes Panguragan Lor terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi desa. Seperti apa langkahnya?



Membenahi jalan merupakan upaya pertama sebelum kegiatan lainnya dapat terwujud. Tak terkecuali bagi desa. Pentingnya infrastruktur bak pilar dasar. Hal itulah yang mendasari Pemerintah Desa Panguragan Lor, Kecamatan Panguragan terus bekerja ekstra membenahi jalan desa.

Kuwu Desa Panguragan Lor Walid Syamsudin mengatakan, pembangunan infrastruktur khususnya akses jalan merupakan hal paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Ketika kita punya akses jalan yang baik, maka semua kegiatan juga akan semakin lancar,”

ujarnya.

Selain itu, dengan memprioritaskan pembangunan fisik berupa infrastruktur jalan, masyarakat bisa hidup dengan sejahtera sehingga perekonomian masyarakat pun semakin meningkat.

Pria 56 tahun itu diketahui menargetkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program saat dirinya mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di Desa Panguragan Lor. Walid mengatakan, saat ini, ia masih terus menggenjot progres pembangunan yang diharapkan dapat selesai sebelum masa kepemimpinannya berakhir di

2025 mendatang.

“Progresnya kurang lebih sudah mencapai 50%, Mudah-mudahan dapat selesai sebelum akhir masa jabatan,” tutur pria yang kerap disapa Kang Uju itu.

Selain membangun akses jalan, Walid juga tengah berencana melakukan betonisasi aliran sungai yang terdapat di lahan persawahan Desa Panguragan Lor. Pasalnya, beberapa lahan milik warga yang berada di sekitar muara sungai sering tergenang banjir akibat perbedaan elevasi tanah.

“Kontur tanah di daerah tersebut miring, sehingga saat debit air sedang tinggi. Lahan sekitarnya sering tergenang air,” ungkapnya.

Walid menjelaskan, para petani yang memiliki lahan di daerah muara sungai tak jarang gagal panen akibat tergenang banjir. Untuk itu, selain membangun akses jalan, ia juga menargetkan betonisasi sungai agar saat debit air tinggi tidak lagi menimbulkan dampak terhadap lahan sawah.

Walid berharap, dengan terus mengakselerasi pembangunan fisik di wilayahnya, cita-cita untuk menjadi desa mandiri dapat segera terwujud.

“Saya berharap Desa Panguragan Lor segera menjadi desa mandiri,” tandasnya. •Mir

Gebang Akan Punya Sentra Peternakan

Agar tak cemari lingkungan, Pemdes Gebang ingin bangun sentra peternakan terpusat tahun ini. Seperti apa?

Warga Desa Gebang, Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, semula sangat mengeluhkan tentang kondisi kandang kerbau yang ada di tanah titisara. Mereka kesah akan polusi yang ditimbulkan setiap hari saat ada asap pembakaran. Asap pembakaran tersebut membuat udara disekitar menjadi buruk dan mengganggu pernafasan.

Banyaknya keluhan tersebut, membuat Pemerintah Desa (Pemdes) Gebang berscepat menggagas solusi. Tahun ini Pemdes Gebang akan membuat sentra peternakan terpusat yang nantinya akan dijadikan kelompok ternak terpusat.

“Tahun ini kami pemerintah Desa Gebang akan membuat sentra ternak terpusat. Jadi tidak ada lagi kendang kambing, sapi, ataupun kerbau yang di pinggir rumah,” kata Rahmat Gumilar, Sekretaris Desa Gebang.

Rahmat berkeinginan Desa Gebang mulai berbenah terhadap lingkungan sehingga lebih tertata dan bersih.

“Nantinya setelah peternakan terpusat berdiri, lingkungan di sekitar rumah warga menjadi bersih, tertata dan terutama bebas polusi pembakaran sisa rumput,” jelasnya.

Pemdes Gebang telah menyiapkan tanah bengkok milik desa yang akan digunakan untuk pe-



mindahan kandang ternak warga sehingga tidak mengganggu masyarakat Desa Gebang.

“Kita pindahkan ke tanah bengkok yang letaknya jauh dari pemukiman. Kurang lebih lahan seluas 1 hektare akan dialih fungsikan sebagai kandang,” tutur Rahmat.

Selanjutnya, Pemdes juga akan memfasilitasi pembentukan kelompok ternak yang terdiri dari peternak kambing, kerbau dan sapi.

“Itu nanti kami bina, kami fasilitasi berupa tanah dan kan-

dangnya semua dari Pemdes. Peternak tinggal nempatin. Kita sudah anggarkan sekitar Rp 200 juta di tahun depan,” jelas Rahmat.

Sementara lahan bekas kandang kerbau lama yang selama ini berdiri di lahan desa akan difungsikan untuk kepentingan masyarakat Desa Gebang.

“Misalnya kita bisa buat pom mini, pasar atau ruang terbuka hijau nantinya. Itu harapan kita. Lalu untuk peternakan terpusat kita atur agar menghasilkan pupuk dari kotoran ternaknya,” katanya. •Kus

Panongan Lor Berbenah Wujudkan Desa Wisata

Potensi alam yang dimiliki Pemdes Panongan Lor ini tak lama akan segera diwujudkan menjadi wisata milik desa. Ada spot swafoto hingga air terjun indah.



Salah satu desa yang berada di dataran tinggi Kabupaten Cirebon ini, mulai membenahi potensi alamnya. Memiliki areal perbukitan dan persawahan yang membentang, Desa Panongan Lor, Kecamatan Sedong, akan mulai menarik para wisatawan.

Kuwu Desa Panongan Lor Agus Syamsah mengungkapkan, rencana pembangunan desa wisata Panongan Lor telah diinisiasi sejak lama.

“Di awal jabatan saya sudah berkeinginan mewujudkan itu.

Kami pun sudah punya *Desain Engenering Desain (DED)* untuk kawasan wisatanya,” ungkap Agus.

Agus mengatakan, akan membangun sebuah tempat khusus swafoto untuk selfi dengan latar belakang perbukitan dan sawah-sawah. Di tempat itu juga akan disediakan gerai UMKM warga sekitar.

“Jadi nantinya bisa buat nongkrong-nongkrong juga,” ujar Agus.

Selain membangun spot swafoto, Agus berkeinginan membuka wisata air terjun yang

akan terintegrasi dengan wisata lainnya. Namun, sampai saat ini Pemerintah Desa Panongan Lor belum berani untuk membuka wisata air terjun tersebut.

“Karena ada satu dan lain hal yang menyebabkan kami belum membuka wisata air terjun itu,” paparnya.

Agus meyakini, air terjun akan menjadi daya tarik tersendiri karena dikelilingi tebing-tebing dan pepohonan rindang.

“Untuk mewujudkan itu kita akan bersinergi dengan 2 desa tetangga yakni Desa Belawa dan Desa Wangkelang. Karena lokasinya tepat di perbatasan 2 desa tersebut,” tutur Agus.

Sehingga Agus berencana menyediakan jembatan gantung sebagai penghubung antara Desa Panongan Lor dengan Desa Belawa. Sekaligus untuk menambah ikon wisata di Desa Panongan Lor.

“Semoga rencana ini bisa mendorong perekonomian masyarakat dan bisa membangun desa untuk lebih maju lagi,” ujar Agus.

Sampai saat ini, pemerintah desa telah mengajukan program ke Kementerian Desa untuk membangun desa wisata ini. Agus pun berharap bisa mendapatkan bantuan dari pihak swasta untuk pengembangan wisata Desa Panongan Lor.

•Soy

Mertapadakulon Bakal Punya Perdes Sampah

Tahun ini Pemdes Mertapadakulon menargetkan bebas sampah. Langkahnya dimulai melalui Perdes Sampah yang akan disahkan. Seperti apa?

Belum lama ini, Pemerintah Desa Mertapadakulon telah berhasil menangani persoalan sampah yang sempat menggunung di TPS desa. Tepatnya pada Agustus 2022 lalu, puluhan ton sampah telah diangkut dan dibebaskan.

Kuwu Mertapadakulon Suherman mengungkapkan, sampah di TPS Mertapadakulon sempat *overload* karena kiriman sampah dari desa lain. Meski demikian, Suherman menerangkan telah tertangani.

Ia pun optimistis jika persoalan sampah di desa pada tahun ini akan mulai dibenahi. Mengingat belum lama ini, Pemdes Mertapadakulon telah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon melalui nota kesepahaman tentang program penanganan sampah.

Menurutnya, DLH Kabupaten Cirebon akan menyiapkan dua bak kontainer sampah terpilah di TPS Mertapadakulon. Selanjutnya DLH akan mengangkutnya secara rutin setiap dua hari sekali. Sementara untuk biaya pengangkutannya akan diserahkan Pemdes Mertapadakulon.

Suherman menambahkan, anggaran bidang persampahan sebesar Rp 30 juta telah disiapkan untuk membuat pagar batas TPS dan biaya operasional pengangkutan.

"Kami berencana membuat



pagar TPS dan menyiapkan satu pegawai keamanan. Tujuannya agar warga membuang sampah pada tempatnya," tambahnya.

Suherman menyadari, masih banyak warga desa maupun warga desa lain yang membuang sampah sembarangan di sekitar TPS meski pemdes telah melarangnya.

"Setiap selesai salat subuh saya seringkali memantau kondisi TPS, ternyata banyak yang membuang sampah bukan di TPS, melainkan di samping jalan. Saya sudah beri peringatan, namun masih banyak warga yang melanggar," ungkapnya.

Akibatnya, TPS Mertapadakulon sering mengalami penumpukan sepanjang puluhan meter dan menyebabkan para warga sekitar merasa terganggu.

Karena itu, Pemdes Mertapadakulon kini tengah menginisiasi lahirnya Peraturan Desa (Perdes) sampah. Suherman ingin tahun depan memiliki Perdes khusus agar persoalan sampah segera bebas.

"Kalau ada perdes, minimal nanti ada payung hukum untuk mengatur sampah. Mulai dari pembuangan, pengawasan hingga pengangkutannya," pungkasnya. •Muiz



Glatikan

A lunan dzikir subuh baru saja berhenti dari pengeras suara masjid. Casta, sebut saja begitu, bergegas mendekati gerobak dagangannya. Tongkat bambu menumpuk di atas gerobak. Bendera merah putih berbeda ukuran berjejer rapih. Sebelum ia mendorong gerobak bersiap menjemput rezeki di bulan Agustus, saya menyempatkan menyapanya.

Selain tongkat dan bendera, ada barang dagangan lain yang menarik perhatian saya. Gangsing kayu dan gangsing bambu tergolek di salah satu sisi gerobak. "Ini kan bulan Agustus Pak, bulan permainan tradisional buat rakyat," ujarnya.

Dengan semangat, ia menyebutkan panjat pinang, tarik tambang, balap karung, bola api, hingga sampyong. Ia bahkan menyebutkan beberapa permainan tradisional lainnya. Sepertinya percakapan pagi itu menjadi ajang nostalgia masa kecilnya.

"Tapi sekarang tanah lapang tempat bermain anak sudah jarang Pak," ucapnya lirih. Ia bercerita tentang mainan kesukaannya waktu kanak-kanak: *glatikan*. Di beberapa daerah ada yang menyebutnya *toklean*, *patrekan* atau *janakan*.

Glatikan bagi saya juga menarik. Mainan ini penuh makna dan filosofi. Cocok untuk pejabat, aparatur pemerintah, atau siapa saja yang punya *eager* untuk kemajuan. Mari kita belajar dari *glatikan*.

Permainan ini sederhana. Alatnya hanya dua batang kayu berdiameter sekitar sebesar ibu jari. Satu batang panjang sekitar dua jengkal, batang yang kedua berukuran sekitar satu jengkal. Untuk itulah ia diberi nama *glatikan*, *gla* berarti jengkal, sedangkan *tik* adalah bunyi yang ditimbulkan ketika batang pertama memukul batang kedua.

Pemain pertama mengungkit batang kecil dengan batang yang lebih panjang dari lubang di tanah atau diantara dua batu bata. Ia lalu memukul batang yang terungkit. Tugas pemain kedua (bisa lebih dari satu), sebagai lawan main, menangkap batang yang terlempar akibat pukulan.

Batang kecil yang terlempar ini saya artikan sebagai masalah. Masalah yang dirasakan atau dialami masyarakat. Tugas pemain kedua adalah menangkap masalah ini. Jika dia tidak mampu menangkap, maka bisa dipastikan ia kesulitan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tugas pemain kedua berikutnya adalah melemparkan batang yang sudah ditangkap itu agar kembali ke titik awal, ke titik pengungkit. Jika berhasil maka ia memenangkan permainan. Ini berarti ia sudah mampu menyelesaikan masalah publik.

Butuh kecermatan, kehati-kehatian, perhitungan matang, dan ketepatan dalam melemparkan batang agar pas mengenai titik pengungkit. Begitu pun ketika kita menyelesaikan masalah publik.

Jika batang itu tidak mengenai titik pengungkit, maka pemain kedua dihukum menggendong pemain pertama. Ini bermakna, pejabat harus tetap menggendong masyarakat ketika upaya memecahkan permasalahannya belum sesuai target. Pemerintah harus tetap bersama masyarakat untuk terus bahu-membahu menyelesaikan segala masalah.

Jangan sebaliknya, menangkap masalah saja tidak. Acuh tak acuh, atau menyelesaikan persoalan sekadarnya saja. Pola pikir sebagai pemecah masalah (*problem solver*) dan memberikan layanan prima harus ditegakkan.

Jika masih mengalami kebuntuan, cobalah sejenak bermain *glatikan*. Agar kita bisa ingat dan terlatih menangkap masalah dan memberikan solusi. Rasakanlah sesekali, betapa indahnya kita menggendong lawan (bukan musuh) permainan.

Mulailah juga berpikir, untuk menyelamatkan permainan tradisional, salah satunya melestarikan *glatikan*. Selamatkanlah dunia bermain anak-anak, dengan memfasilitasi ruang bermain ramah anak (RBRA) untuk mereka mengasah rasa, olah pikir, dan ketangkasan dalam menyelesaikan masalah hidup. Selamat melahirkan generasi *problem solver*.



**SEKRETARIS DPRD
DAN SELURUH PEGAWAI**

**DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA**

77

**PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

77

PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

